

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan mempunyai peranan yang kompleks terhadap perekonomian yang dapat kita rasakan seperti sekarang, dimana hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan bank atau lembaga keuangan.

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syari'ah atau lebih dikenal dengan nama bank syari'ah di Indonesia, bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syari'ah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan BMT dan nilai asetnya sampai trilyunan, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syari'ah.

¹ Syafii Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. Hal 37.

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

BMT menganut azas syari'ah, semua transaksi yang dilakukan harus berprinsip syari'ah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya, bila tidak terpenuhi maka transaksi tersebut batal. Jadi kedudukan akad sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip syari'ah.

Salah satu akad yang digunakan BMT dalam transaksi pembiayaan berbasis jual beli adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah kontrak jual-beli di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Walaupun akad *murabahah* ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang pelaksanaan akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syari'ah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas.

BMT Amanah Insani merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. BMT melayani sektor mikro, sehingga lembaga keuangan ini mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi bawah yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya

dalam bentuk pembiayaan, BMT Amanah Insani menggunakan akad bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *murabahah* untuk akad jual beli. Pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang cukup mudah untuk diaplikasikan dalam penyaluran pembiayaan saat ini.

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *murabahah* agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang yang dijual belikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa bank (BMT) harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *murabahah*, barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus sudah menjadi milik bank (BMT). Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.²

Berdasarkan dari hasil observasi, akad *murabahah* pada praktiknya belum sepenuhnya menggunakan konsep jual beli yang utuh. Dalam pembiayaan *murabahah* ini, barang yang menjadi objek dalam jual beli tersebut dibeli oleh nasabah sendiri kemudian menyerahkan pembayarannya kepada BMT. Hal ini dilakukan oleh sebagian besar BMT. Sehingga yang

²Suhendi,Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal.73.

terjadi adalah pinjam-meminjam, bukan jual beli yang sebenarnya.

Hal tersebut merupakan isu-isu kontroversi yang berkembang di masyarakat tentang praktik pembiayaan yang diterapkan oleh sebagian besar BMT. Permasalahan tersebut ditemui di BMT Amanah Insani, dimana BMT tersebut berada di lokasi yang strategis yaitu di area pasar kota Sukoharjo, sehingga permasalahan tentang praktik pembiayaan khususnya *murabahah* perlu dikaji.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang akad pembiayaan khususnya *murabahah*, dimana akad jual beli tersebut merupakan akad yang paling banyak digunakan pada lembaga keuangan syari'ah saat ini. Penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BMT AMANAH INSANI SUKOHARJO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Insani Sukoharjo dan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah seperti dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan

murabahah di BMT Amanah Insani Sukoharjo dan kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat akademisi maupun praktisi perbankan syariah dan tambahan khasanah bacaan ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pengembangan perbankan syariah khususnya BMT Amanah Insani Sukoharjo.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Tesis yang berjudul "Analisis terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqih) oleh Bambang Sugeng, tahun 2007.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* dan ijarah telah sesuai dengan hukum kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun belum sesuai dengan fiqih, masih mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*).

2. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ekonomi Islam La Riba yang berjudul "Risiko Akad dalam Pembiayaan *Murabahah* pada BMT di Yogyakarta (Dari Teori ke Terapan)" oleh Asmi Nur Siwi Kusmiyati, tahun 2007.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek pembiayaan *murabahah* pada BMT digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan. Pelaksanaan akad *murabahah* pada BMT pada umumnya sudah memenuhi prinsip syari'ah, namun hal yang dinilai belum memenuhi prinsip syari'ah yaitu penggunaan akad *murabahah* untuk pembiayaan tambah modal, yang seharusnya menggunakan akad bagi hasil.

3. Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembayaran *Murabahah*-Study Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta" oleh Riyanti, tahun 2010.

Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan adalah penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan semula. Faktor ini berkaitan dengan akad di awal perjanjian pembiayaan. Sehingga untuk menghindari terjadinya wanprestasi perlu adanya tinjauan atau analisis terhadap akad pembiayaan tersebut.

Perjanjian jual beli dalam pembiayaan pada lembaga keuangan didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

Muhammad Syafi'i Antonio memberikan pandangan tentang hal tersebut di atas bahwa:

Jika seseorang datang kepada bank syari'ah dan ingin meminjam dana untuk membeli barang tertentu, misalnya mobil atau rumah, suka atau tidak ia harus melakukan jual beli dengan bank syariah. Di sini, bank syari'ah bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli. Jika bank memberikan pinjaman (dalam pengertian konvensional) kepada nasabah untuk membeli barang-barang itu, bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu.³

Sedangkan jual beli itu sendiri menurut pengertian syari'at seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabid dalam kitab Fikih Sunnah disebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴

Menurut jumhur (mayoritas) ulama membolehkan jual beli semacam ini alasannya adalah asal semua aktivitas adalah boleh, sedangkan dalam hal ini tidak ditemukan dalil yang mengharamkan praktek ini, dan tidak sama dengan riba dilihat dari berbagai sudut. Sedangkan menurut golongan hanafiah

³Syafii Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. Hal 170.

⁴Sabiq, Sayyid. 1995. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Bandung: Al-Ma'arif. Hal 47-48.

berpendapat boleh berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menetapkan kebolehannya.⁵

Jual beli dalam perbankan syariah salah satunya menggunakan akad *murabahah*. Dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* oleh Muhammad Syafi'i Antonio disebutkan bahwa yang dimaksud *Ba'i al-Murabahah* atau sering disebut *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁶

Dewan Syari'ah Nasional sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah dan yang memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, telah mengeluarkan fatwa tentang produk *murabahah* ini yang dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dalam fatwa tersebut dimuat ketentuan yang mengatur akad dalam pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

1. Akad atau kontrak dalam pembiayaan *murabahah* antara bank dan nasabah harus bebas riba.
2. Harus digunakan untuk barang-barang yang halal.
3. Pembelian barang dapat dibiayai oleh sebagian atau seluruhnya oleh bank.
4. Barang yang dibeli harus atas nama bank secara sah dan bebas riba.

⁵Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*. Wahid Ahmadi. Surakarta: Era Intermedia. Hal 377-378.

⁶Syafii Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. Hal 101.

5. Semua hal yang berkaitan dengan pembelian mengenai biaya modal serta harga kesepakatan yang harus dibayar nasabah harus disampaikan oleh bank.
6. Pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah untuk menghindari penyalahgunaan akad tersebut.
7. Secara prinsip barang harus sudah menjadi milik bank, jika pembelian diwakilkan oleh nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai permasalahan dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan teori yang ada. Dalam fatwa yang telah disebutkan di atas, barang yang dijual belikan harus terlebih dahulu milik bank atau dibeli terlebih dahulu oleh BMT. Namun permasalahan muncul ketika dalam pembiayaan *murabahah*, nasabah sendiri yang melakukan pembelian terhadap obyek jual beli. Hal ini dikhawatirkan jika pembiayaan jual beli menyimpang menjadi pinjam meminjam dalam konsep konvensional, yaitu utang uang.

Dari uraian di atas mengenai temuan pada penelitian sebelumnya, dan berdasar ketentuan yang harus diikuti oleh lembaga keuangan syari'ah maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan analisis tentang pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Insani Sukoharjo.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yang bersifat *deskriptif kualitatif* dengan cara menggambarkan mengenai suatu kenyataan empiris dari obyek yang dijadikan penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Ida Bagoes Mantra bahwa, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat.⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analitis untuk memaparkan data-data yang didapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.

2. Obyek Penelitian

Penelitian dilakukan di BMT Amanah Insani Sukoharjo sebagai salah satu BMT yang berkembang di kota Sukoharjo dan ditemui permasalahan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data kualitatif dalam penelitian ini adalah informan yang secara langsung memberikan data kepada peneliti atau diperoleh langsung dari tempat penelitian sebagai data primer. Informan dalam penelitian ini

⁷Mantra, Ida Bagoes. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 38.

adalah manajer dan staf karyawan yang menangani pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Insani.

Sedangkan data sekunder yang bersumber pada buku-buku sebagai berikut:

- Halal Haram dalam Islam oleh Yusuf Qardhawi yang diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi tahun 2007. Surakarta: Era Intermedia.
- Bank Syariah dari Teori ke Praktik oleh Muhammad Syafi'i Antonio tahun 2001. Jakarta: Gema Insani.
- Fiqh Muamalah oleh Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. Tahun 2007. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fikih Ekonomi Keuangan Islam oleh Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih dan Prof. Dr. Shalah ash-Shawi. Tahun 2004. Jakarta: Darul Haq.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan mendekati sumber informasi dengan jalan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian atau dilakukan dengan cara interview dengan staf karyawan bagian umum/*customer service* untuk mengetahui kebijakan dan mekanisme akad pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Insani Sukoharjo. Wawancara dilakukan secara terfokus pada masalah penelitian

dimana pertanyaan penelitian telah diformulasikan sebelum wawancara dilakukan. Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan penelitian.

b. Dokumentasi

Dari hasil wawancara yang dilakukan di obyek penelitian, selanjutnya informasi yang diperoleh dicatat untuk bahan kajian sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian dilakukan pengamatan dan analisis terhadap dokumen berupa form akad pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Insani.

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisis deskriptif. Analisis yang digunakan adalah analisis induktif, dengan menarik hal-hal yang bersifat khusus ke dalam hal-hal yang bersifat umum. Setelah dilakukan analisis terhadap data BMT Amanah Insani, kemudian ditafsirkan dengan kerangka pemikiran berdasarkan studi pustaka. Terakhir adalah menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

Bab I, adalah bagian pendahuluan, yang disusun dengan tahapan berikut:

1. Menggambarkan latar belakang masalah penelitian yang mana masalah tersebut berkaitan langsung dengan judul penelitian.
2. Melakukan pembatasan masalah.
3. Membuat rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian untuk mempertajam masalah-masalah yang dipecahkan.
4. Menggambarkan tujuan penelitian yang mana untuk suatu informasi yang ingin diperoleh untuk menjawab rumusan masalah.
5. Manfaat penelitian yakni hasil yang akan diperoleh berkaitan dengan tujuan penelitian.
6. Berikutnya adalah kajian pustaka yang menguraikan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.
7. Metode Penelitian adalah suatu urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang penulis ajukan.
8. Sistematika Penulisan yang menggambarkan logika berfikir dalam penulisan laporan penelitian.

Bab II, adalah tinjauan pustaka, untuk menguraikan teori-teori yang disusun dengan tahapan berikut:

1. Tinjauan umum tentang lembaga keuangan mikro syariah.
2. Produk-produk BMT
3. Teori tentang akad.
4. Prinsip operasional dan produk-produk BMT.

5. Pembiayaan *murabahah* pada BMT.
6. Landasan hukum *murabahah*.
7. Ketentuan dalam pembiayaan *murabahah*.

Bab III, adalah hasil penelitian, untuk menguraikan hasil penelitian yang disusun dengan tahapan berikut:

1. Profil BMT Amanah Insani
2. Mekanisme pengajuan pembiayaan di BMT Amanah Insani
3. Kebijakan pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Insani
4. Pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Insani

Bab IV, adalah analisis terhadap akad pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Insani.

Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.